

Lampiran I : KUESIONER PENELITIAN**LEMBAR KUESIONER**

Para Responden yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda mengisi kuesioner ini.

Adapun kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : Luky Lrestiwawan
NIM : 11440318
Jurusan / Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi
Universitas : Muhammadiyah Ponorogo

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Ponorogo)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenaan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i ditempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Luky Krestiwawan

KUESIONER PENELITIAN

A. Demografi Responden

- Nama Instansi :
- Nama Responden :
- Tanggal Pengisian :
- Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan
- Latar Belakang Pendidikan :
- Ekonomi / Akuntansi
 - Hukum
 - Teknik
 - Sosial
 - Lainnya
- Pendidikan Terakhir :
- SLTA/Sederajat
 - Diploma (D3)
 - Strata 1 (Sarjana)
 - Strata 2 (Master)
 - Strata 3 (Doktor)
- Jabatan :
- Kepala Badan/Dinas/Instansi
 - Sekretaris/Kabid/Kabag
 - Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie
 - Lainnya
- Lama Bekerja :
- 1 – 5 tahun
 - 6 – 10 tahun
 - 11 – 15 tahun
 - 16 – 20 tahun
 - ≥ 21 tahun
- Usia :
- 20 – 30 tahun
 - 31 – 40 tahun
 - 41 – 50 tahun
 - ≥ 51 tahun

B. Pernyataan mengenai Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Terimakasih Bapak/Ibu, telah berkenaan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (X).

Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/pernyataan.

Daftar Singkatan:

- RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- KUA : Kebijakan Umum Anggaran
- PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- BUD : Bendahara Umum Daerah
- LRA : Laporan Realisasi anggaran
- PPA : Pejabat Pengguna anggaran
- PPKD : Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
- DPA : Dokumen Pelaksanaan anggaran
- RKA : Rencana kerja dan Anggaran
- LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam pernyataan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja dibagi menjadi 4 (empat) variabel. Variabel pertama adalah perencanaan anggaran, variabel kedua pelaksanaan anggaran, variabel ketiga adalah pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, dan variabel keempat adalah evaluasi kinerja. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Keterangan	(STS) Sangat Tidak Setuju	(TS) Tidak Setuju	(N) Netral	(S) Setuju	(SS) Sangat Setuju
Skor	1	2	3	4	5

PERENCANAAN ANGGARAN (X1)

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai.					
2. RKPD memuat mengenai kerja yang teruku dan pendanaannya.					
3. Dokumen KUA didasarkan pada dokumen RKPD dalam periode tersebut.					
4. SKPD dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan PPAS dalam menyusun RKA-SKPD.					
5. Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.					
6. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.					
7. Dalam penyusunan RKA-SKPD, memperhatikan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.					

8. Dalam penyusunan RKA-SKPD, RAPBD serta pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah, DPRD, dan SKPD itu sendiri.					
9. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi.					
10. Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari provinsi dan evaluasi APBD dari kabupaten/kota.					

IMPLEMENTASI / PELAKSANAAN ANGGARAN (X2)

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan.					
2. Dokumen Anggaran Kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD.					
3. SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan Anggaran Kas.					

PELAPORAN / PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (X3)

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.					
2. Laporan keuangan SKPD dan Pemda yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.					
3. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda dan laporan keuangan perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.					

EVALUASI KINERJA (X4)

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.					
2. Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.					
3. Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggaran.					

**C. PERNYATAAN MENGENAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Y)**

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin					
3. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
4. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.					
5. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
6. Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.					
7. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					
8. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikato kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.					
9. Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.					
10.LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					